

Analisis Peran *E-Government* dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dengan Literasi Digital dan Infrastruktur Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus di Kelurahan Desa Dagangan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)

Risa Afifatur Rohmah^{1*}, Anik Malikah², Dyah Arini Rudiningtyas³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: 22101082151@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study was conducted to examine how the role of e-government in encouraging increased accountability of public services in Dagangan Village, Parengan Subdistrict, Tuban Regency, by considering digital literacy and infrastructure as moderating variables. The background of this study is based on the importance of transparency and accountability aspects in public services, as well as the obstacles that arise due to low levels of digital literacy and limited infrastructure in rural areas. This research uses a quantitative approach through distributing questionnaires to 363 respondents who have utilized e-government services. Data analysis was conducted using the Moderated Regression Analysis (MRA) method. The results revealed that e-government has a negative but significant influence on public service accountability. In addition, digital literacy and infrastructure proved to be able to strengthen the relationship between e-government and accountability. These findings indicate that the implementation of e-government accompanied by increased digital literacy capacity and adequate infrastructure support can accelerate the creation of public services that are more transparent, accountable, and responsive to community needs.

Keywords: *E-government, public service accountability, digital literacy, infrastructure, mra.*

PENDAHULUAN

Setiap negara harus memiliki sistem pemerintahan yang terkelola dengan baik guna mencapai akuntabilitas dalam pelayanan publik, dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Akuntabilitas merupakan kewajiban institusi untuk bertindak jujur sebagai pengelola penguasaan khususnya dalam melaksanakan program, memberi arahan, mengambil keputusan, serta menyampaikan laporan kinerja kepada pihak yang lebih tinggi maupun masyarakat. Prinsip ini menjadi faktor utama dalam membangun tata kelola institusi yang baik dan meningkatkan transparansi di berbagai bidang. Selain itu, akuntabilitas memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia (Gioh, 2021). Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah di seluruh jenjang dan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Walaupun prinsip akuntabilitas telah diterapkan, masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan aparatur yang profesional dan bertanggung jawab guna mewujudkan pelayanan publik yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan (Ignasius et al., 2023). Pelayanan publik bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, serta harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Natika, 2024). Tantangan utama dalam pelayanan publik tidak hanya menciptakan pelayanan yang efisien, tetapi juga adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, akuntabilitas berperan penting untuk mendorong kinerja pemerintah agar dapat menjalankan tugas secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya (Tonnyl, 2022).

Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mendorong pemerintah mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Agustin et al., 2024). Penggunaan TIK di sektor publik diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, dan responsif. Salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik adalah melalui penerapan *e-government* yang

mendukung operasional pemerintahan dan layanan publik secara digital (Kurniati et al., 2023). Penerapan *e-government* bertujuan meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta memperbaiki layanan pemerintah. Selain itu, *e-government* dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan platform digital seperti website dan aplikasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, memantau kinerja pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan publik (Rizka et al., 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai menerapkan *e-government* untuk meningkatkan layanan publik dan transparansi. Namun, penerapannya masih terkendala oleh terbatasnya infrastruktur, resistensi dari pejabat, dan rendahnya literasi digital. Mengatasi hambatan ini membutuhkan strategi menyeluruh, seperti investasi teknologi, pelatihan, serta kebijakan pendukung *e-government* (Nastia, 2024).

Literasi digital saat ini menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Hal ini mencakup penguasaan TIK secara kritis, etis, dan efektif, serta kemampuan mengolah informasi dan berkomunikasi digital. Lebih dari sekadar memahami teknologi, literasi digital mendorong pemanfaatannya secara positif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, memperluas literasi digital sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Putri et al., 2024). Setiap negara berupaya mencapai kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh peningkatan kualitas hidup. Kualitas ini tidak hanya bergantung pada jumlah fasilitas, tetapi juga pada kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Infrastruktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar. Ketersediaan dan efektivitasnya meningkatkan kesejahteraan sosial, sementara infrastruktur yang buruk dapat menimbulkan masalah sosial (BAPPEDA, 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *e-government* dapat memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal itu dapat dilihat dari negara yang mengadopsi *e-government* cenderung memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Demikian dapat disimpulkan bahwa *e-government* tidak hanya alat untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tapi juga mekanisme untuk meningkatkan tata kelola pemerintah (Musri et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran *E-government* Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dengan Literasi Digital Dan Infrastruktur Sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus di kelurahan desa dagangan kecamatan parengan kabupaten tuban)”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan Pembangunan dan praktik *e-government* guna meningkatkan akuntabilitas secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Seorang pakar psikologi sosial icek ajzen mengembangkan sebuah teori penting untuk memahami hubungan antara sikap dan perilaku. Dalam teorinya yang dikenal sebagai *theory of planned behavior* (teori perilaku yang direncanakan) yang menjelaskan bagaimana kemungkinan sikap dapat diwujudkan menjadi perilaku. *Theory of planned behavior* (TPB) atau teori perilaku yang dirancang, adalah teori yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya niat untuk berperilaku, berdasarkan TPB niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu : Sikap, Norma subjektif, Dan persepsi terhadap kontrol (Ajzen & Fishbein, 1977). Sikap terhadap perilaku merupakan landasan bagi seseorang dalam mengambil tindakan yang didasari oleh pertimbangan apakah Tindakan tersebut menguntungkan atau tidak, faktor yang kedua adalah norma subjektif merupakan pengaruh sosial dan tekanan yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan, sedangkan persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan pandangan seseorang mengenai tingkat kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan suatu tindakan, jika suatu

tindakan dianggap mudah seseorang akan cenderung melakukannya, tetapi jika sulit ia cenderung menghindarinya. Pada akhirnya tindakan akan dipengaruhi oleh persepsi berdasarkan pengalaman sebelumnya (Andriana, 2020).

Theory of planned behavior (TPB) memiliki tiga tujuan utama di antaranya: Memprediksi dan memahami bagaimana motivasi mempengaruhi perilaku, Mengidentifikasi strategi untuk mengubah perilaku, Menjelaskan berbagai perilaku manusia. Teori ini dapat memprediksi perilaku manusia dengan asumsi bahwa manusia berpikir secara rasional dan sistematis dalam memanfaatkan informasi yang tersedia, serta mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan atau menghindari perilaku tertentu (Nuri et al., 2022).

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat secara berkala, mengingat mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik yang cukup besar. Akuntabilitas ini mencakup pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya secara optimal, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas, guna mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Sri Lestari et.al 2022). Untuk mengukur akuntabilitas pelayanan publik terdapat beberapa indikator menurut Herizal et al., (2020) di antaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan kepada warga negara tidak boleh dipahami sebagai melayani pelanggan : dalam hal ini kepentingan publik bukan sekedar kumpulan kepentingan individu, melainkan hasil dialog tentang nilai-nilai Bersama, Oleh karenanya tugas pemerintah tidak hanya memenuhi permintaan konsumen, tetapi juga membangun kepercayaan dan kerja sama dengan warga negara. Akuntabilitas pelayanan publik didasarkan pada nilai-nilai bersama yang diperkuat melalui kepercayaan dan kolaborasi dengan masyarakat.
2. Memenuhi seluruh kebutuhan publik : Pemerintah perlu membangun kesepahaman bersama terkait kepentingan publik, menciptakan rasa tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan bersama. Akuntabilitas dalam pelayanan publik di kembangkan melalui pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.
3. Mengutamakan nilai kewarganegaraan di atas nilai kewirausahaan : Kepentingan publik harus diwujudkan melalui komitmen bersama antara pelayanan publik dan warga negara untuk membangun masyarakat yang lebih baik, bukan semata-mata oleh manajer wirausaha yang hanya bertindak jika tersedia dana publik.
4. Berpikir secara strategis dan bertindak secara demokratis : yaitu merancang kebijakan dan program yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan responsif. Hal ini dapat diwujudkan melalui upaya bersama dan proses kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak.
5. Memahami akuntabilitas dalam pelayanan publik tidak dapat direduksi menjadi hal yang sederhana : pemerintah harus mempertimbangkan lebih dari sekedar mekanisme pasar, yakni dengan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, nilai-nilai sosial, norma-norma politik, standar profesional, serta kepentingan warga negara.
6. Mengutamakan pelayanan dari pada pengendalian : peran utama pemerintah adalah mendukung warga negara dalam penyampaian kepentingan bersama bukan mengatur atau memberi instruksi kepada mereka.
7. Menilai kemanusiaan lebih penting dari pada sekedar fokus pada produktivitas : Organisasi publik dan jaringan tempat mereka terlibat cenderung lebih berhasil dalam jangka panjang jika di bangun melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama, yang didasarkan pada penghormatan terhadap setiap individu.
8. *Governance* : adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kepentingan publik melalui mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan

partisipasi warga. *Good Governance* ditandai dengan bebasnya praktik dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta penghormatan terhadap hak berdasarkan prinsip hukum.

E-government

Menurut Irawan (2020) *e-government* adalah pemanfaatan internet untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan berorientasi pada pelayanan. Secara singkat *e-government* adalah suatu perkembangan baru dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang bertumpu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Tujuannya untuk memberikan layanan yang sederhana, murah dan efektif tanpa campur tangan pegawai sektor publik atau sistem antrian yang panjang.

Menurut Syahronny et al., (2024) untuk mengukur *e-government* terdapat beberapa indikator diantaranya sebagai berikut :

1. Dimensi ekonomi : manfaat *e-government* adalah mengurangi biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan, dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan.
2. Dimensi sosial : manfaat *e-government* beragam, mulai dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, penargetan layanan pemerintah yang lebih baik, memperkuat kemampuan menjamin keselamatan dan keamanan
3. Dimensi pemerintah : manfaat *e-government* dapat meningkatkan pencapaian *good governance* dalam peningkatan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas atau demokrasi dibandingkan dengan pemerintah konvensional.

Literasi Digital

Menurut Naufal (2021) Literasi digital merupakan kemampuan dalam memperoleh, memahami, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber dalam format digital. Lebih dari sekedar keterampilan dalam menggunakan sumber digital secara efektif, literasi digital juga mencerminkan pola pikir tertentu yang didasarkan pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat di era modern, namun dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan dan ketidaksesuaian, salah satunya hambatan yang dihadapi belum adanya konsep yang seragam mengenai literasi digital di wilayah pedesaan, serta ketiadaan kerangka pedoman yang mengatur tahapan literasi digital bagi masyarakat desa (Syafitri D.A et al., 2024). Meningkatkan literasi digital di desa dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal dan mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih cerdas. Peningkatan kualitas literasi digital dapat membantu menyetarakan hak dan tanggung jawab Perempuan dan laki-laki dalam bidang Pendidikan, pengetahuan, serta aspirasi di berbagai sektor seperti hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu literasi digital juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat (Pitrianti et al., 2023).

Untuk mengukur Literasi digital terdapat beberapa indikator menurut Naufal (2021) di antaranya sebagai berikut :

1. Perakitan pengetahuan : Yaitu kemampuan menyusun informasi berdasarkan berbagai sumber yang dapat dipercaya.
2. Kemampuan menyampaikan informasi : Yaitu mencakup pemikiran kritis dalam memahami isi dengan perhatian terhadap keabsahan dan kelengkapan sumber dari internet.
3. Kemampuan untuk membaca dan memahami informasi yang bersifat tidak berurutan serta bersifat dinamis

4. Pemahaman akan pentingnya media konvensional serta keterkaitannya dengan media berbasis internet.
5. Kesadaran akan akses terhadap jaringan individu yang dapat dijadikan sumber referensi dan bantuan.
6. Penerapan filter dalam menyaring informasi yang diterima.
7. Memiliki kenyamanan serta akses untuk menyampaikan dan membagikan informasi.

Infrastruktur

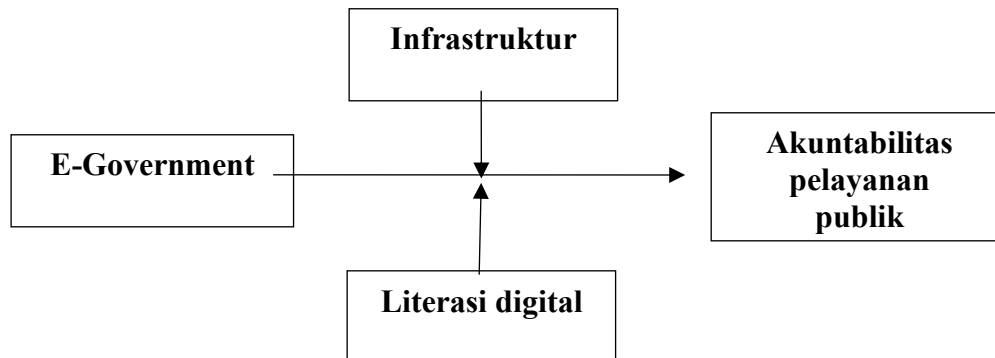
Infrastruktur memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga pengembangannya turut berkontribusi pada kemajuan nasional. Penyediaan infrastruktur bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat. Salah satu cara untuk terus meningkatkan kualitas layanan infrastruktur adalah dengan memahami tingkat kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur yang telah di sediakan oleh pemerintah (BAPPEDA, 2024).

Untuk mengukur Infrastruktur terdapat beberapa indikator menurut Agustin, I & Harianti (2023) di antaranya sebagai berikut :

1. Infrastruktur teknologi informasi (TI) seperti : jaringan dan server yang berfungsi penting dalam mendukung operasional layanan dalam suatu lingkungan bisnis. Tanpa adanya infrastruktur, distribusi data akan terganggu dan aktivitas bisnis tidak dapat berjalan dengan lancar.
2. Infrastruktur sebagai kelas aset : infrastruktur merupakan aset yang kurang stabil dibandingkan saham, tetapi menawarkan keuntungan lebih tinggi, sehingga menarik minat investasi dari Perusahaan dan individu.
3. Investasi swasta dalam infrastruktur publik adalah partisipasi perusahaan dalam pembangunan infrastruktur negara untuk ekspansi bisnis, seperti pembangunan pipa dan rel oleh perusahaan energi, yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu serta tinjauan teori maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Hipotesis Penelitian

- H₁ : *E-government* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelayanan publik.
- H₂ : Literasi digital memoderasi pengaruh *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
- H₃ : Infrastruktur memoderasi pengaruh *e-government* dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu populasi atau sampel tertentu, dengan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen penelitian,

dianalisis menggunakan teknik statistik, dan difokuskan pada pengujian hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2020) populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup subjek atau objek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam peneliti ini yaitu masyarakat desa Dagangan yang berjumlah 3.936 jiwa. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Dagangan, teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat eror sebesar 5% sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 363 responden.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner berbentuk *google form* yang diberikan kepada responden, dimana responden memberikan tanggapannya terhadap pernyataan kuesioner dengan menggunakan skala *likert*

Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik uji interaksi yang dikenal sebagai *Moderated Regression Analysis* (MRA). Tujuannya untuk mengetahui variabel moderasi berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Rumus persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z_1 + \beta_3 Z_2 + \beta_4 (XZ_1) + \beta_5 (XZ_2) + e$$

Keterangan :

- Y : Akuntabilitas pelayanan publik
 α : Konstanta
 β_1 : Koefisien regresi variabel independen
 $\beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi untuk variabel moderasi
 $\beta_4 \beta_5$: Koefisien regresi untuk efek interaksi moderasi
X : *E-government*
 Z_1 : Literasi digital
 Z_2 : Infrastruktur
e : Error atau gangguan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>E-government</i> (X)	363	3	5	4,21	0,61
Literasi digital (Z_1)	363	2	5	4,30	0,47
Infrastruktur (Z_2)	363	3	5	4,12	0,78
Akuntabilitas (Y)	363	3	5	4,38	0,49
Valid N (listwise)	363				

Sumber : *Output spss 26*, Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1di atas dapat diketahui hasil uji statistik deskriptif, demikian disimpulkan bahwa jumlah data yang diolah pada penelitian ini sebanyak 363 responden sebagai berikut :

1. Pada variabel *e-government* (X) diperoleh rata-rata jawaban responden sebesar 4,21 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maximum sebesar 5 serta nilai standar deviasi sebesar 0,611
2. Pada variabel literasi digital (Z_1) diperoleh rata-rata jawaban responden sebesar 4,30 dengan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maximum sebesar 5 serta nilai standar deviasi sebesar 0,472.

3. Pada variabel infrastruktur (Z_2) diperoleh rata-rata jawaban responden sebesar 4,12 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maximum sebesar 5 serta nilai standar deviasi sebesar 0,789
4. Pada variabel akuntabilitas (Y) diperoleh rata-rata jawaban responden sebesar 4,38 dengan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maximum sebesar 5 serta nilai standar deviasi sebesar 0,497.

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	R tabel
Akuntabilitas (Y)	Y.1	0,797	0,103	Valid
	Y.2	0,816		
	Y.3	0,855		
<i>E-government</i> (X)	X.1	0,805		
	X.2	0,525		
	X.3	0,805		
	X.4	0,535		
	X.5	0,555		
Literasi digital (Z_1)	Z1.1	0,521		
	Z1.2	0,669		
	Z1.3	0,408		
	Z1.4	0,723		
	Z1.5	0,703		
	Z1.6	0,636		
	Z1.7	0,308		
Infrastruktur (Z_2)	Z2.1	0,869		
	Z2.2	0,869		
	Z2.3	0,573		

Sumber : *Output spss* 26, Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2 hasil uji validitas per item menunjukkan bahwa R hitung > R tabel (0,103) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Ketentuan	keterangan
<i>E-government</i> (X)	0,657	>0,60	Reliabel
Literasi digital (Z_1)	0,642		
Infrastruktur (Z_2)	0,622		
Akuntabilitas (Y)	0,762		

Sumber : Data primer diolah, 2025

Dari tabel 3 di atas diketahui bahwa variabel Akuntabilitas (Y), *E-government* (X), Literasi digital (Z_1), Infrastruktur (Z_2) memiliki nilai *Cronbach's alpha* > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		363
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.88358650
Most Extreme Differences	Absolute	.038
	Positive	.038
	Negative	-.024
Test Statistic		.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, *E-government*, Literasi digital, Infrastruktur memiliki nilai sig sebesar $0,20 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X	.477	2.095
	Z ₁	.624	1.604
	Z ₂	.591	1.692

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 diatas diketahui bahwa variabel *e-government* (X) dengan nilai *Variance inflation factor* (VIF) sebar 2,095, Literasi digital (Z₁) dengan nilai *Variance inflation factor* (VIF) sebesar 1,604, Dan infrastruktur (Z₂) dengan nilai *Variance inflation factor* (VIF) sebesar 1,692 demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai *Variance inflation factor* (VIF) < 10 , maka variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.776	.337		.000
	X	-.035	.024	-.133	.141
	Z ₁	-.018	.015	-.082	.253
	Z ₂	.013	.025	.038	.609

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui nilai signifikan pada variabel *e-government* (X) sebesar 0,141, Literasi digital (Z₁) sebesar 0,253, Infrastruktur (Z₂) sebesar 0,609 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel diatas tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikan $> 0,05$.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 7 Hasil Uji MRA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.089	.422		28.632	.000
	X	.056	.017	.325	3.316	.001
	Z ₁	.117	.049	.935	2.371	.018
	Z ₂	-.286	.110	-1.477	-2.594	.010
	XZ ₁	-.007	.002	-2.165	-2.846	.005
	XZ ₂	.014	.005	2.427	2.608	.009

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan nilai konstanta (α) sebesar 12,089, *E-government* (X) sebesar 0,056, Literasi digital (Z₁) sebesar 0,117, Infrastruktur (Z₂) sebesar -0,286, Interaksi antara variabel X dengan Z₁ sebesar -0,007, serta interaksi antara variabel X dengan Z₂ sebesar 0,014. Sehingga dapat diperoleh persamaan analisis regresi moderasi sebagai berikut :

$$Y = 12.089 + 0,056 + 0,117 - 0,286 - 0,007 + 0,014$$

Yang berarti :

1. Nilai konstanta sebesar 12.089 menunjukkan bahwa *e-government*, literasi digital, infrastruktur, interaksi variabel *e-government* dengan literasi digital, interaksi variabel *e-government* dengan infrastruktur, di asumsikan nilainya 0, maka nilai akuntabilitas pelayanan publik sebesar 12.089
2. Nilai koefisien *e-government* sebesar 0,056 menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan variabel *e-government* menyebabkan nilai akuntabilitas pelayanan publik (Y) yang di capai meningkat sebesar 0,056 dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
3. Nilai koefisien literasi digital sebesar 0,117, menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan variabel literasi digital menyebabkan nilai akuntabilitas pelayanan publik (Y) yang dicapai meningkat sebesar 0,117 dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
4. Nilai koefisien infrastruktur sebesar -0,286, menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan variabel infrastruktur menyebabkan nilai akuntabilitas pelayanan publik (Y) yang di capai menurun sebesar -0,286 dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
5. Nilai koefisien interaksi variabel *e-government* dengan literasi digital sebesar -0,007, menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan satuan interaksi variabel *e-government* dengan literasi digital menyebabkan hubungan antara *e-government* dengan akuntabilitas pelayanan publik (Y) menurun sebesar -0,007, dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
6. Nilai koefisien interaksi variabel *e-government* dengan infrastruktur sebesar 0,014, menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan satuan interaksi variabel *e-government* dengan infrastruktur menyebabkan hubungan antara *e-government* dengan akuntabilitas pelayanan publik (Y) meningkat sebesar 0,014, dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.967 ^a	.936	.935	.30622

a. Predictors: (Constant), XZ₂, Z₁, X, Z₂, XZ₁

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa nilai *adjusted R squer* sebesar 0,935 (93,5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *e-government* (X), Literasi digital (Z_1), Infrastruktur (Z_2), Interaksi antara variabel *e-government* dengan literasi digital, dan interaksi antara variabel *e-government* dengan infrastruktur dapat menerangkan variabel akuntabilitas pelayanan publik (Y). Sedangkan 6,5% yang lain akan dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

2. Uji Parsial (t)

Tabel 9 Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.089	.422		28.632	.000
	X	.056	.017	.325	3.316	.001
	Z_1	.117	.049	.935	2.371	.018
	Z_2	-.286	.110	-1.477	-2.594	.010
	X Z_1	-.007	.002	-2.165	-2.846	.005
	X Z_2	.014	.005	2.427	2.608	.009

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa :

1. Hasil uji variabel *e-government* nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa *e-government* berpengaruh terhadap akuntabilitas pelayanan publik.
2. Hasil uji variabel literasi digital sebagai variabel moderasi, nilai sig sebesar $0,018 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa literasi digital dapat memoderasi hubungan *e-government* terhadap akuntabilitas pelayanan publik.
3. Hasil uji variabel infrastruktur sebagai variabel moderasi, nilai sig sebesar $0,010 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel infrastruktur dapat memoderasi hubungan *e-government* terhadap akuntabilitas pelayanan publik.
4. Hasil uji interaksi antara variabel *e-government* dengan literasi digital nilai sig sebesar $0,005 < 0,05$ menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa literasi digital dapat memoderasi hubungan *e-government* terhadap akuntabilitas pelayanan publik.
5. Hasil uji interaksi antara variabel *e-government* dengan infrastruktur nilai sig sebesar $0,009 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa infrastruktur dapat memoderasi hubungan *e-government* terhadap akuntabilitas pelayanan publik.

Pembahasan

Pengaruh *E-government* Terhadap Akuntabilitas Pelayanan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government* berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelayanan publik, hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi masih rendah, meskipun sistem telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuzan et al., (2023) yang menyatakan bahwa penerapan *e-government* belum optimal akibat layanan yang terbatas, kurang terkoordinasi, dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Keberhasilan penerapan *e-government* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga pada kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkannya. Oleh sebab itu, pendampingan masyarakat menjadi aspek penting melalui edukasi literasi digital, penyuluhan layanan digital, serta bantuan teknis. Upaya ini dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas layanan publik ditingkat desa.

Selain itu, pendampingan berperan dalam menjembatani kesenjangan digital, sehingga *e-government* dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti halnya di Desa Dagangan.

Hasil jawaban responden pada kuesioner, variabel *e-government* memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,21 dari skala *likert* 1-5 yang berarti “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pelaksanaan *e-government* di Desa Dagangan sudah berjalan dengan cukup baik, memberikan kemudahan dalam pelayanan publik secara digital, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-government* oleh aparat Desa Dagangan dipengaruhi oleh sikap positif terhadap teknologi, dukungan dari lingkungan dan masyarakat yang mendorong sistem digital, dan rasa percaya diri dalam menggunakan sistem tersebut. Faktor tersebut yang berperan dalam membentuk niat untuk menerapkan *e-government* dan kemudian di implementasikan dalam pelayanan publik.

Literasi Digital Dapat Memoderasi Pengaruh *E-government* Terhadap Akuntabilitas Pelayanan Publik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam menghubungkan antara niat dan tindakan dalam penggunaan *e-government*. Hasil penelitian ini mendukung adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurlaila et al., (2024), yang menyatakan bahwa peningkatan literasi digital mampu mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, terutama di wilayah pedesaan yang sedang beralih ke digitalisasi seperti desa Dagangan ini. Hasil jawaban responden pada kuesioner, variabel literasi digital memperoleh rata-rata nilai 4,30 dari skala *likert* 1-5. yang berarti “setuju”. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memanfaatkan teknologi, sehingga turut menunjang penggunaan layanan publik berbasis digital di Desa Dagangan

Menurut *Theory Of Planned Behavior* literasi digital berperan dalam menguatkan keterkaitan antara niat dan perilaku nyata, karena seseorang yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik akan lebih sering memanfaatkan teknologi. Dengan kemampuan literasi digital yang baik, aparat pemerintah maupun masyarakat mampu untuk berperan langsung dalam pelaksanaan layanan publik yang akuntabel dan transparan.

Infrastruktur Dapat Memoderasi Pengaruh *E-government* Terhadap Akuntabilitas Pelayanan Publik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai dan berkualitas memiliki peran penting dalam memperkuat keterkaitan antara *e-government* dan akuntabilitas pelayanan publik, pembangunan serta perawatan infrastruktur menjadi faktor pendukung teknis dan bagian strategi yang menentukan keberhasilan implementasi *e-government* di desa Dagangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin, I & Harianti, (2023) yang menyatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan sistem pelayanan digital, karena tanpa infrastruktur yang memadai proses distribusi data dan akses layanan akan terganggu. Simbolon et al., (2021), juga menyatakan bahwa kualitas infrastruktur dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam menjangkau dan memberikan layanan secara merata kepada masyarakat. Hasil jawaban responden dalam kuesioner, variabel infrastruktur memperoleh nilai rata-rata 4,12 dari skala *likert* 1-5, yang berarti “setuju”. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur di Desa Dagangan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, dianggap cukup mendukung pelaksanaan layanan *e-government*, meskipun masih dibutuhkan peningkatan dan pemerataan akses diseluruh wilayah desa.

Berdasarkan kaitannya dengan *Theory Of Planned Behavior* pengaruh infrastruktur terhadap akuntabilitas pelayanan publik dijelaskan dalam aspek persepsi terhadap kontrol yang artinya ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan kemudahan aparat desa

maupun masyarakat dalam mengakses, memahami serta memanfaatkan sistem *e-government*, Ketika individu merasa bahwa fasilitas dan sarana yang tersedia sudah mendukung, maka keinginan untuk menggunakan layanan digital cenderung lebih mudah diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Variabel akuntabilitas pelayanan publik, diperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,38 dari skala *likert* 1-5, Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan “setuju” bahwa pemerintah desa Dagangan telah menerapkan prinsip akuntabilitas secara maksimal, yang meliputi aspek transparansi, tanggung jawab, dan upaya membangun kepercayaan publik.
2. Variabel *e-government* memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,21 dari skala *likert* 1-5 yang berarti “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pelaksanaan *e-government* di Desa Dagangan sudah berjalan dengan cukup baik, memberikan kemudahan dalam pelayanan publik secara digital, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.
3. Variabel literasi digital memperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,30 dari skala *likert* 1-5. yang berarti “setuju”. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memanfaatkan teknologi, sehingga turut menunjang penggunaan layanan publik berbasis digital di Desa Dagangan.
4. Variabel infrastruktur memperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,12 dari skala *likert* 1-5, yang berarti “setuju”. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur di Desa Dagangan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, dianggap cukup mendukung pelaksanaan layanan *e-government*, meskipun masih dibutuhkan peningkatan dan pemerataan akses diseluruh wilayah desa.

Keterbatasan

Pada penelitian ini, peneliti telah melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur ilmiah, namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan seperti :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *e-government* berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelayanan publik, namun secara teori seharusnya menunjukkan hasil positif dan signifikan.
2. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner yang bersifat tertutup dan terstruktur, sehingga dapat membatasi informasi yang diperoleh
3. Metode pengumpulan data dari penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga informasi yang diperoleh belum lengkap karena responden hanya menjawab pernyataan yang telah disediakan.
4. Kuesioner hanya dibagikan kepada responden yang pernah menggunakan *e-government*, masyarakat tidak memiliki pengalaman menggunakan layanan *e-government* tidak dilibatkan dalam sampel, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mewakili pandangan seluruh masyarakat.

SARAN

Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan diatas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan adanya sosialisasi penerapan *e-government* dan pendampingan secara berkelanjutan kepada masyarakat.

2. Disarankan untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lebih bervariasi (kuantitatif dan kualitatif) seperti melakukan wawancara yang mendalam terkait akuntabilitas pelayanan publik.
3. Disarankan untuk menambah variabel penelitian seperti kebijakan pemerintah, budaya organisasi, kompetensi SDM atau faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pelayanan publik.
4. Disarankan untuk melibatkan seluruh masyarakat guna memperoleh pemahaman yang lebih luas terkait pengetahuan, kendala, serta minimnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif dalam mendorong peningkatan penggunaan layanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I, W., & Harianti, S. (2023). *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Agustin, D., Utami, S. S., Kushariyadi, K., Suprayitno, D., & Dwiwijaya, K. A. (2024). *Teori Komprehensif Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). *Attitude-Behavior Relations: A Theoretical Analysis And Review Of Empirical Research*. 8(4), 888.
- Andriana, N. (2020). KEPATUHAN BENDAHARA DESA DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM PRESPEKTIF TEORI PLANNED BEHAVIOR. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- BAPPEDA. (2024). *EXECUTIVE SUMMARY INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN NGAWI*. BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. <https://bappeda.ngawikab.go.id/wp-content/uploads/2025/01/Executive-Summary-IKLI-Final-2024.pdf>
- Dhea Adinda Syafitri, Sutiawati Sutiawati, & Ichsan Fauzi Rachman. (2024). Menghadapi Tantangan Digital: Peran Literasi Digital Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 145–156. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.106>
- Gioh, A. (2021). Pelayanan Publik E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(1).
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Ignasius, M., Sakir, M., & Abdussamad, N. (2023). Pengaruh Profesionalisme Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kota Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 33–52.
- Irawan, B. (2020). E-government sebagai bentuk baru dalam pelayanan publik: sebuah tinjauan teoritik. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 200–209.
- Kurniati, poni sukaesih, Gislawati, ranti tri, Safitri, faiza nur, & Lutpi, arijal julhaijan. (2023). implementasi kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kota bandung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*, 9(4), 875–886.
- Musri, M., Pasaribu, F. R., Khudri, Ariyati, Y., & Rahman, Y. (2024). Implementasi e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi negara. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 8888–8893.
- Nastia. (2024). Transformasi digital melalui inovasi e-government pada pemerintah daerah kabupaten buton selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 12(02), 268–281.

- Natika, L. (2024). Transformasi pelayanan publik di era digital: menuju pelayanan masa depan yang lebih baik. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2040>
- Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, 1(2), 195–202.
- Nuri, P., Budiyo, & suhermin. (2022). *Theory of planned behavior : implementasi perilaku electronic word of mouth pada konsumen marketplace*. 15.
- Nurlaila Nurlaila, Zuriatin Zuriatin, & Nurhasanah Nurhasanah. (2024). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Bima. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 21–37. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1468>
- Pitrianti, S., Sampetoding, E. A. M., Purba, A. A., & Pongtambing, Y. S. (2023). LITERASI DIGITAL PADA MASYARAKAT DESA. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 43–49. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.655>
- Putri, N. M., Listiawati, W., & Rachman, I. F. (2024). Pengaruh literasi digital terhadap pemberdayaan masyarakat dalam konteks sdgs 2030. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 349–360.
- Rizka, R., Muhammad, abdillah gembong, Santoso, iwan ahmad puji, Rafael, D. Y., Danu, A., & Maulana Akbar. (2024). inovasi e-government dalam meningkatkan kualitas administrasi pelayanan publik: studi kasus inovasi pemerintah daerah kabupaten jember. *Jurnal Interelasi*, 1(2), 62–79.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Sri Lestari, & Roy Valiant Salomo. (2022). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah di indonesia: sebuah tinjauan literatur. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 798–808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>
- Sugiyono. (2020). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Syahronny, M., Rochim, A. I., & Murti, I. (2024). analisis penerapan e-government pada aplikasi sistem pelayanan rakyat sidoarjo (sipraja) di desa prambon kecamatan prambon kabupaten sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, 4(06), 55–62. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i06.1675>
- Tonnyl, T. (2022). Akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada kantor kecamatan kongbeng kabupaten kutai timur. *Jurnal Adminitrasi Publik*, 5(1), 123–140.
- Wahyuzan, A. putri, Purba, D. eldora, Azzahra, M. rahma, & Nasirwan. (2023). Implementasi e-government dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan modern: kajian literatur di kota medan. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 5(2).